BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep yang mengacu pada sektor ekonomi yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, memiliki nilai tambah berasal dari ide kreatif, budaya, dan intelektual. Ekonomi merupakan suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas, Dengan adanya pendekatan ini, industrialisasi tidak lagi terbatas pada proses mekanis atau massal seperti pada masa lampau, melainkan berkembang menuju industri kreatif yaitu sector Industri kreatif yang menghasilkan ouput dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup.¹ Dalam era ekonomi modern, nilai suatu produk atau layanan tidak lagi ditentukan semata oleh bahan dasar atau metode produksinya. Yang lebih penting justru kemampuan berinovasi dan berkreasi, apalagi di tengah kemajuan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing di pasar global, pelaku industri tidak cukup hanya menawarkan harga terjangkau atau kualitas produk yang baik. Mereka juga harus mampu tampil unggul melalui inovasi, daya cipta, serta imajinasi yang orisinal.

Ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor ekonomi penting mendorong perekonomian Indonesia. pada tahun 2006, ekonomi kreatif resmi ditetapkan sebagai strategi industri, menandai bahwa pengelolaan dan pengembangan industri telah memasuki era baru. Pembentukan Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2015 memperkuat kerangka kembangan sektor ini. Pada tahun 2019 ektor ini tercatat telah menyerap tenaga kerja sebanyak 17,2 juta orang,yang setara dengan13,8% dari total, Ekonomi kreatif juga memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya

¹ Rochmat Aldy Purnomo, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta : Ziyad Visi Media, 2016), hal 17

pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya di berbagai bidang kreatif. Data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah berhasil menyerap 23,98 juta tenaga kerja pada tahun 2022 dan mencapai pertumbuhan tenaga kerja sebesar 9,49% pada tahun 2023.²

Ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di era digital, hiburan digital telah menjadi fenomena social media. Salah satu sub sektor yang menunjukkan perkembangan pesat adalah platform berbagi video, seperti *YouTube*, sektor yang merasakan dampak langsung dari kehadiran YouTube di Indonesia yaitu Usaha kecil, sektor pendidikan, industri game, musik, hingga media massa turut merasakan manfaat dari keberadaan YouTube di Indonesia. Banyak pelaku usaha dan konten kreator menjadikan platform ini sebagai sarana utama untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Tak sedikit kreator konten yang memulai aktivitas mereka di YouTube hanya sebagai hobi atau bentuk ekspresi pribadi. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak di antara mereka yang berhasil menghasilkan pendapatan dari video yang mereka unggah. Dengan demikian, YouTube kini telah berkembang menjadi wadah produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di berbagai kalangan.

Dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna smartphone yang berdampak pada meningkatnya akses sosial media, khususnya YouTube, saat ini menjadi pilihan masyarakat untuk mencari informasi, mencari tutorial, mencari hiburan hingga mencari penghasilan, banyak konten kreator di Indonesia berhasil memanfaatkan platform ini untuk menghasilkan karya-karya kreatif yang tidak hanya dinikmati masyarakat, tetapi juga bernilai, sehingga konten kreator menjadi salah satu profesi yang banyak diminati dari berbagai kalangan khususnya anak muda, karena potensi pendapatan yang dimiliki konten kreator sangat menjanjikan

² Azkan niswah Perkembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia Serta Penerapannya pada Era Digitalisasi, Kompas siana 2024.

pada era digital.³ Secara umum rata-rata, seorang konten kreator dapat memperoleh penghasilan uang sekitar US\$ 3-5 atau setara Rp 45-75 ribu per satu video dengan 1.000 penayangan. Apabila sebuah video berhasil ditonton hingga satu juta kali, penghasilan yang bisa diraih oleh pembuat konten tersebut dapat mencapai sekitar 5.000 dolar Amerika, atau kurang lebih setara dengan 75 juta rupiah. Pendapatan ini bisa lebih besar jika disertai kerja sama dengan sponsor atau adanya fitur monetisasi tambahan dari platform.⁴ Dengan demikian, konten YouTube bukan hanya sebagai produk yang menghibur, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi kreatif dan kekayaan intelektual yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan nilai ekonomi dan sosial.

Melihat fenomena penghasilan youtuber yang menjanjikan lebih tinggi daripada profesi pada umumnya,⁵ akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan bahwasannya sertifikat konten kreator youtube bisa dijadikan sebagai jaminan fidusia di Lembaga Keuangan, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022, pelaksanaan UU ekonomi kreatif mengatur mengenai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Sebagaimana PP tersebut, pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dapat diperoleh oleh ekonomi kreatif melalui lembaga keuangan yang berbasis kekayaan intelektual. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif sebagai dasar hukum dan dorongan, PP ekonomi kreatif tentang pelaksanaan peraturan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia namun juga untuk mendukung membantu para pelaku ekonomi kreatif untuk memperoleh pembiayaan. Dengan mengeluarkannya peraturan ini memberikan dukungan dan pengakuan terhadap asset ekonomi kreatif termasuk konten digital seperti video youtube, peraturan tersebut memuat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan konten mereka sebagai jaminan untuk memperoleh

³ Yasmi, siprianus palete, *Potensi Pendapatan Dalam Industri Hiburan Digital Studi Kasus Pada Platform Konten Creator Social Media*, Accounting Accountability and Organization System, Vol. 5, No. 2, 2024, hal 3.

⁴ ilham fikriansyah, *pendapatan youtuber dengan 1000 subscriber*, detik jabar 2023

⁵ Igak satya Wijaya, *Konten Youtube Jadi Jaminan Utang, Pakar Unair : Angin Segar Bagi Industri Kreatif*, Dinas Kominfo, 2022,

pembiayaan baik dari Lembaga konvensional maupun Syariah. Sehingga para kreator konten youtube memastikan bahwa konten tersebut sudah terdaftar di Direktorat jendral HKI.⁶ serta dikelola dengan baik secara mandiri maupun dialihkan haknya kepada orang lain, kemudian dibuktikan dengan sertifikat dari kementerian hukum dan HAM.⁷

Pada dasarnya HKI memiliki nilai manfaat ekonomi sehingga menjadikannya sebagai aset berharga bagi sebuah perusahaan dan termasuk dalam bentuk aset tidak berwujud. segala jenis HKI telah diatur dan dilindungi di Indonesia yaitu hak cipta, hak merek, dan hak paten dimana HKI tersebut termasuk dalam ranah hukum perdata dan merupakan hukum benda dalam bentuk benda bergerak yang tidak berwujud. HKI merupakan harta benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga HKI dapat dijadikan sebagai jaminan perjanjian utang .

Peraturan tersebut tidak hanya berlaku pada Lembaga Keuangan Konvensional saja, tetapi juga berlaku di Lembaga keuangan syariah. Namun, Lembaga keuangan Syariah dalam operasionalnya menggunakan akad. Akad yang terkait dengan jaminan utang adalah akad rahn. Dalam akad rahn, terdapat syarat dan ketentuan terkait dengan objek yang dijadikan jaminan, salah satunya harus barang yang bernilai atau berharga, selama memenuhi prinsip keadilan dan tanpa riba selama diperbolehkan oleh syara, syarat-syarat barang yang dapat digunakan untuk jaminan gadai menurut kesepakatan para ulama, ketentuan terkait pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang yang dalam bentuk rahn diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI 25/2002.⁸ Bahwasannya fatwa tersebut memberikan pedoman

⁶ redaksi botang post, *Pertumbuhan Industri Kreatif Konten YouTube Bisa Jadi Jaminan Kredit*, botang post id, 2022

⁷ Vinka Kurnia Dewi, Ferdiansyah Putra Manggala, *Urgensi Pembebanan Jaminan Fidusia Pada Konten Youtube Yang Telah Memiliki Iklan (Adsense)*, *Journal Inicio Legis* Vol 3 No 2, 2022, hal.118

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang rahn.

yang jelas mengenai pelaksanaan akad Rahn dalam pegadaian syariah, menekankan hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta pentingnya pemeliharaan barang jaminan.

Dalam perkembangannya objek jaminan dalam akad rahn tidak selalu berbentuk barang, tetapi bisa juga dalam bentuk sertifikat. Menurut Fatwa DSN MUI tahun 2008 mengenai Rahn Tasjily bahwa barang tetap dalam kendali rahin dan bukti kepemilikan diserahkan kepada murtahin Praktik ini lebih seperti Fidusia, oleh karena itu objek rahn berupa sertifikat disebut dengan akad rahn tasjily, karena dengan barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikannya, namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.⁹ Namun, sertifikat yang dapat dijadikan sebagai objek rahn tasjily itu memiliki rukun, syarat, dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman, selama memenuhi prinsip keadilan dan tanpa riba.¹⁰

Dalam ajaran Islam, setiap kegiatan ekonomi memiliki pedoman dan ketentuan yang diatur secara komprehensif melalui Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Melalui kacamata hukum syariah tersebut, timbul pertanyaan kritis: apakah konten yang terdapat dalam sebuah kanal YouTube dapat dijadikan objek jaminan dalam bentuk fidusia, mengingat belum adanya fatwa khusus atau acuan normatif dari otoritas syariah, serta kekhawatiran akan unsur ketidakjelasan (*gharar*). Dengan mempertimbangkan esensi permasalahan yang diuraikan di atas, penulis merasa terdorong untuk menjadikan isu ini sebagai fokus kajian dalam sebuah tulisan yang berjudul “Keabsahan Konten Youtube Sebagai Jaminan Utang Di Lembaga Keuangan Dalam PP No. 24 Tahun 2022 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis menyimpulkan rumusan masalah, sebagai berikut:

⁹ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), hal 127.

¹⁰ Ongky dkk, *Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah*, jurnal hukum tata negara Vol. 2, No 1 2023, hal 5

1. Bagaimana penggunaan sertifikat konten youtube yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang menurut PP No. 24 Tahun 2022?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap objek jaminan konten youtube yang dijadikan sebagai jaminan?
3. Bagaimana Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap peraturan sertifikat konten youtube sebagai jaminan utang dalam PP No. 24 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2022 tentang sertifikat konten youtube sebagai jaminan utang.
2. Untuk mengidentifikasi ketentuan objek syariah terhadap objek jaminan konten youtube yang dijadikan sebagai jaminan.
3. Untuk menganalisis kesesuaian antara peraturan mengenai sertifikat konten youtube sebagai jaminan utang dalam PP No. 24 Tahun 2022 dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai kajian ekonomi kreatif, hukum Islam, dan perbankan syariah, khususnya terkait pemanfaatan sertifikat konten youtube diakui sebagai kekayaan intelektual dan bisa sebagai jaminan utang bagaimana prinsip syariah, khususnya rahn, dapat diadaptasi untuk mendukung inovasi pembiayaan berbasis teknologi dan kekayaan intelektual, bagi para pembaca.

b) Manfaat praktis

Memberikan masukan tentang keselarasan kebijakan pemerintah dengan prinsip syariah, sehingga kebijakan yang diambil lebih inklusif dan relevan bagi pelaku ekonomi kreatif, Membantu konten kreator memahami peluang untuk menggunakan karya mereka sebagai aset ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan. dan diharapkan bermanfaat bagi semua pihak.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian ini, ada penelitian yang membahas hal sejenis, Oleh karena itu perlu ada nya pengkajian Kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif sebagai Jaminan Pembiayaan di Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.*” Skripsi ini membahas peran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Fokus utamanya adalah menganalisis dari perspektif Hukum Positif: Regulasi dan payung hukum terkait HKI sebagai jaminan, termasuk kendala yang dihadapi. Kesesuaian HKI sebagai jaminan dengan prinsip-prinsip syariah. skripsi ini tidak hanya menjelaskan urgensi dan hambatan regulasi, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret untuk pengembangan regulasi dan operasionalisasi HKI sebagai jaminan pembiayaan. Ini menjadikannya referensi penting bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam pengelolaan aset intelektual di sektor ekonomi kreatif.¹¹

Kedua, skripsi yang berjudul, “*Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit*” skripsi ini membahas tentang bagaimana hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit dari sudut pandang hukum di Indonesia. Skripsi ini mengkaji berbagai aspek hukum terkait, termasuk

¹¹ Lailatus saadh, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif sebagai Jaminan Pembiayaan di Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: uin syarif hidayatullah,2024)

peraturan perundang-undangan yang relevan, teori hukum, dan prosedur pelaksanaan jaminan berbasis hak cipta. Hal ini karena hak cipta adalah aset yang bernilai ekonomis, dapat dialihkan, dan memiliki landasan hukum untuk digunakan sebagai jaminan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, implementasi praktisnya memerlukan dukungan regulasi yang lebih terperinci dan penyesuaian pada sistem perbankan dan hukum fidusia.¹²

Ke tiga, skripsi yang berjudul tentang "*Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia Kota Malang tentang Keabsahan Konten Youtube sebagai Benda Jaminan Kredit.*" Penelitian ini membahas bagaimana konten Youtube, sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual, dapat dijadikan jaminan kredit di lembaga keuangan, meskipun nilainya tidak tetap dan tergantung pada jumlah viewers dan subscribers. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini melibatkan wawancara dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat syarat dalam mengajukan pembiayaan menggunakan konten Youtube, dan tokoh MUI Kota Malang memperbolehkan penggunaan konten tersebut sebagai jaminan kredit, asalkan memenuhi tiga unsur: nilai ekonomis, manfaat, dan adanya sertifikat HaKi. Skripsi ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pemahaman hukum terkait penggunaan konten digital dalam konteks ekonomi syariah.¹³

Ke empat berjudul "*Analisis konten youtube sebagai jaminan objek jaminan utang persfektif PP No 24 tahun 2022 (study kasus pada akun youtube nurilasyrof)*" penelitian ini membahas bagaimana potensi konten youtube sebagai jsminn utang. Penelitian ini menunjukkan bahwasannya di era industry 4.0, youtube telah berkembang pesat dan menjadi sumber pendapatan yang

¹² Dian hera wati tanti, *Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit*, (makasar ; UIN Alauddin Makasar, 2018)

¹³ Hermes Azura azkiyah, *Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit*, (malang :universitas islam negri maulana malik Ibrahim malang, 2023)

signifikan bagi banyak konten kreator, termasuk Nuril Asyrof, yang menghasilkan pendapatan melalui endorser dan metode pasif melalui menotifikasi video namun meskipun youtube bisa memberikan nilai ekonomis, penelitian ini juga menegaskan bahwasannya akun Nuril Asyrof tidak memenuhi syarat sebagai objek jaminan menurut pp Nomor 24 tahun 2022 karena akun tersebut belum terdaftar sebagai kekayaan intelektual dan tidak memenuhi kriteria nilai ekonomis yang ditetapkan.¹⁴

Ke lima berjudul *Konten Youtube Sebagai Jaminan Pembiayaan di Lembaga Keuangan (Tinjauan Yuridis dan Filosofis)* Skripsi ini membahas potensi konten YouTube sebagai jaminan pembiayaan di lembaga keuangan syariah berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022, dengan menyoroti bahwa konten YouTube sebagai aset tidak berwujud (immateral) dapat dijadikan jaminan melalui skema fidusia asalkan telah tercatat dan bersertifikat resmi dari DJKI Kemenkumham. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan kepustakaan, serta dianalisis menggunakan teori Maqāsid asy-Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara hukum positif dan syariah konten YouTube dapat dijadikan jaminan, praktik ini masih menghadapi tantangan seperti risiko akun diblokir, dibajak, atau fluktuasi nilai pendapatan yang menyulitkan penilaian ekonomi. Dari perspektif Maqāsid asy-Syaria'ah, penggunaan konten YouTube sebagai jaminan dapat mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam perlindungan akal dan harta, namun masih terdapat kekurangan dalam aspek perlindungan harta karena sifat digital.¹⁵

Table 1.1

¹⁴ Muhammad Zaky Farhan Al-Hilmy, *Analisis konten youtube sebagai jaminan objek jaminan utang perspektif PP No 24 tahun 2022 (study kasus pada akun youtube nurilasyrof)*, (malang universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

¹⁵ Anim Kotimatul Faizah, *Konten Youtube Sebagai Jaminan Pembiayaan di Lembaga Keuangan (Tinjauan Yuridis dan Filosofis)* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2024)

penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	<p><i>Hak Kekayaan Intelektual dalam Ekonomi Kreatif sebagai Jaminan Pembiayaan di Indonesia: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.</i></p> <p>(Laelatus Saadah, 2024)</p>	<p>Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai objek jaminan pembiayaan</p>	<p>Perbedaan terletak pada objek fokus penelitian membahas HKI secara umum, Perbedaan pendekatan yang digunakan karena penelitian focus pada peneanan kajian regulasi dan kebutuhan hukum positif tidak membahas hukum syariaah</p>
2.	<p><i>Tinjauan Yuridis Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit</i></p> <p>(Dian hera wati tanti, 2018)</p>	<p>Tema umum membahas konsep jamianan dala konteks hukum meskipun dengan objek yang berbeda. Pendekatan yuridis mengunnakan penedekatan hukum untuk menganalisis subjek yang dibahas, beusaha memberikan pemahaman yang jelas tentang aspek legal dari objek yang dijadikan jamianan.</p>	<p>Judul dan fokus penelitian berbeda, Meskipun keduanya mengangkat tema jaminan dalam aspek hukum, dokumen pertama lebih spesifik pada konten digital, sedangkan yang kedua lebih luas, mencakup teori dan praktik hukum terkait hak cipta sebagai jaminan.</p>
3.	<p><i>Pandangan tokoh mejlis ulama Indonesia kota malang tentang keabsahan konten youtube sebagai jamianan kredit.</i></p> <p>(Hermes aura azkiyah 2023)</p>	<p>Persamaan terletak pada topik konten youtube sebagai benda jamianan utang.</p>	<p>Fokus dan pendekatan yang berbeda skripsi sebelumnya mengulas pandangan tokoh mejlis ulama sehingga perbedaan terletak pada sudut pandang fokus pada perspektif keagamaan dan etis.</p>

4	<p><i>Analisis konten youtube sebagai jaminan objek jaminan utang persfektif PP No 24 tahun 2022 (study kasus pada akun youtube nurilasyrof)</i></p> <p><i>(Muhammad Zaky Al Hilmy,2023)</i></p>	<p>Tema utama yaitu konten youtube sebagai objek jaminan berdasarkan perspektif hukum, dan praturan berfokus pada bagaimana konten digital dapat dimanfaatkan sebagai asset yang bernilsi ekonomi.</p>	<p>Pendekatan dan fokus penelitian lebih berfokus pada legalitas dan kekayaan akun youtube dalam persfektif hukum positif,dan Syariah</p>
5	<p>Konten Youtube Sebagai Jaminan Pembiayaan di Lembaga Keuangan (Tinjauan Yuridis dan Filosofis)</p> <p><i>(Anim Kotimatul Faizah,2024)</i></p>	<p>konten YouTube sebagai objek jaminan dalam pembiayaan di lembaga keuangan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022. Keduanya melihat konten YouTube sebagai bagian dari kekayaan intelektual (HKI) yang bernilai ekonomi dan dapat dijadikan jaminan fidusia, serta menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah untuk mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat, khususnya melalui konsep akad rahn dan pentingnya sertifikasi dari DJKI</p>	<p>Pendekatan dan fokus kajiannya penelitian menitik beratkan pada analisis yuridis dan filosofis dengan menggunakan teori maqasid asy-syariah untuk melihat kemaslahatan, serta menyoroti risiko teknis seperti banned atau pembajakan akun. Sementara itu.</p>

F. Kerangka Berfikir

Rahn secara etimologi berasal dari bahasa arab yang artinya tetap atau kekal, dalam konteks fikih, rahn merujuk pada suatu perjanjian dimana pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) sebagai jaminan atas utang darinya, menurut alkasani dalam kitab *Bada'i al-Shana'i*, *rahn* didefinisikan sebagai tindakan menjadikan

suatu barang yang bernilai secara syariat sebagai jaminan atas utang. Barang tersebut dapat digunakan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari utang jika peminjam tidak mampu membayar.

Rahn merupakan salah satu kajian hukum ekonomi syariah yang secara tekstual tercantum di dalam Alquran, diantaranya terdapat dalam Firman Allah Subhanahu wa ta'ala: Qur'an Surat Al-baqarah ayat 282 yang berbunyi :

بِالْعَدْلِ ۖ وَلَا يَأْبُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
 اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ
 كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ ۚ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
 مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan transaksi utang piutang yang pembayarannya ditangguhkan hingga waktu tertentu, maka catatlah perjanjian tersebut secara tertulis. Hendaknya seorang penulis yang adil dari antara kalian mencatatnya dengan benar dan jujur. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya; maka wajib baginya untuk menulis. Selanjutnya, pihak yang berutang harus mendiktekan isi utangnya, dan dalam melakukannya, hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya, serta tidak mengurangi sedikit pun dari jumlah utang yang ia tanggung. Apabila orang yang berutang tidak mampu menjelaskan secara langsung karena lemah akal, kondisi, atau tidak sanggup berbicara maka wali atau perwakilannya yang harus mendiktekan isi utang tersebut dengan jujur dan adil. Lakukanlah pencatatan ini di hadapan dua orang saksi laki-laki dari kalanganmu. Namun, jika tidak tersedia dua saksi laki-laki, maka cukup satu laki-laki dan dua perempuan yang kamu anggap dapat dipercaya. Hal ini agar jika salah satu dari

perempuan itu lupa, maka yang satunya dapat mengingatkannya. Para saksi tidak boleh menolak ketika dipanggil untuk memberikan kesaksian. Kalian juga tidak boleh merasa bosan untuk mencatat setiap transaksi utang, baik yang bernilai kecil maupun besar, hingga jatuh tempo pembayarannya. Tindakan mencatat ini lebih adil di hadapan Allah, memperkuat bukti kesaksian, serta lebih menjauhkan dari rasa ragu atau perselisihan di kemudian hari. Namun, apabila transaksi yang dilakukan merupakan jual beli tunai secara langsung, maka tidak ada dosa jika kamu tidak mencatatnya. Meskipun demikian, tetap disarankan untuk menghadirkan saksi dalam jual beli tersebut. Jangan sampai penulis dan saksi saling menyulitkan satu sama lain; sebab jika kalian melakukan hal tersebut, maka itu termasuk perbuatan dosa. Bertakwalah kepada Allah, karena Dia-lah yang mengajarkanmu segalanya, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah [2]: 282)¹⁶

Ayat tersebut secara tegas menegaskan bahwa rahn, yaitu penyerahan barang sebagai jaminan dalam transaksi utang-piutang, merupakan instrumen yang diakui dan diperbolehkan dalam ajaran syariat Islam. Ayat ini diturunkan dalam rangka mengatur tata cara bermuamalah secara tertib, adil, dan penuh kehati-hatian, terutama pada situasi di mana pencatatan utang secara tertulis tidak memungkinkan, seperti saat seseorang sedang melakukan safar (perjalanan). Dalam kondisi demikian, Islam memberikan solusi praktis berupa penyerahan barang jaminan kepada pihak pemberi pinjaman sebagai pengganti pencatatan tertulis agar hak-hak para pihak tetap terlindungi..

Kebijakan ini juga diperkuat oleh praktik Nabi Muhammad SAW yang pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pembelian bahan makanan, yang menegaskan bahwa penggunaan rahn bukan hanya dibolehkan, tetapi juga dianjurkan sebagai sarana menjaga hak dan kepercayaan antar pihak dalam transaksi.

¹⁶ Kementerian Agama RI, Qur'an Kemenag (Jakarta: Departemen Agama, 2000), h. 48.

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ.

Arinya: Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. (HR al Bukhari, no. 2513 dan Muslim, no. 1603)

Dengan demikian, rahn dipandang sebagai mekanisme hukum yang mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam hubungan ekonomi, sekaligus menjadi alternatif syar’i dalam sistem pembiayaan, baik dalam konteks sosial tradisional maupun di dalam sistem keuangan syariah modern. Hal ini dikarenakan rahn memiliki rukun dan syarat yang jelas, yaitu rahin (pemberi jaminan), murtahin (penerima jaminan), marhun (barang jaminan), marhun bih (hutang yang dijamin), serta shighat (akad), sehingga setiap pihak mendapatkan posisi yang jelas serta perlindungan hak secara hukum.

Kaidah fiqh yang berkaitan dengan konten youtube sebagai jaminan utang:

أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ لِي

Artinya: Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)

Para ulama fiqh sepakat bahwa *rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh si piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan bisa dipegang atau dikuasai oleh si pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status al-Marhun (menjadi jaminan hutang). Misalnya, apabila barang jaminan itu sertifikat konten youtube, maka yang dikuasai adalah surat sertifikat konten itu.

Dr. Siti Nurhaliza, sebagai seorang ahli media dan komunikasi, menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

di kalangan pembuat konten YouTube, yang saat ini semakin berkembang pesat dan memiliki peran signifikan dalam industri digital. Ia mencermati bahwa banyak kreator konten belum sepenuhnya menyadari betapa seriusnya konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran hak cipta, seperti penggunaan materi milik orang lain tanpa izin resmi, yang dalam praktiknya sering terjadi karena kurangnya pengetahuan maupun kelalaian. Menurut Dr. Siti, kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang serius, tetapi juga merugikan pemilik asli karya tersebut, sehingga meningkatkan literasi mengenai HKI menjadi sangat penting. Oleh karena itu, ia merekomendasikan agar platform besar seperti YouTube mengambil peran aktif dan bertanggung jawab dalam menyediakan sumber daya edukasi yang memadai serta program pelatihan yang mudah diakses oleh seluruh pengguna, terutama para kreator baru. Dengan demikian, pengguna dapat memahami hak serta kewajiban mereka dalam menjaga dan menghormati HKI, sekaligus mengetahui langkah-langkah konkret untuk melindungi karya asli yang mereka ciptakan, seperti mendaftarkan karya secara resmi, menggunakan lisensi yang tepat, serta menghindari tindakan plagiarisme. Dr. Siti Nurhaliza juga menegaskan bahwa penguatan kesadaran ini merupakan fondasi penting agar ekosistem kreator di dunia digital dapat berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan profesional, serta mendukung kemunculan inovasi dan kreativitas tanpa mengorbankan aspek hukum maupun etika. Dengan demikian, upaya edukasi yang terstruktur ini diharapkan mampu mengurangi sengketa hak cipta, meningkatkan perlindungan terhadap karya intelektual, serta membangun budaya digital yang menjunjung tinggi keadilan dan penghormatan terhadap hak pencipta.¹⁷

Dalam konteks jaminan utang, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan arahan penting melalui Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.¹⁸ Fatwa tersebut menjelaskan bahwa akad

¹⁷ Siti Nurhaliza. *Media dan Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan di Era Digital*. Penerbit Media Press, Bandung, 2022, hlm. 75.

¹⁸ Dewan Syariah Nasional, *mejlis ulama Indonesia, himpunan fatwa dewan Syariah national*, (Jakarta, erangga, 2010), hlm. 89.

rahn yang melibatkan penyerahan suatu barang sebagai jaminan utang diperbolehkan dalam Islam, dengan ketentuan bahwa barang yang dijamin harus memiliki nilai ekonomi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pihak penerima jaminan (murtahin) berhak menahan barang gadai (marhun) hingga utang pihak yang berutang (rahin) dilunasi sepenuhnya. Selanjutnya, Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily memperluas ketentuan tersebut dengan menyatakan bahwa jaminan yang bersifat nonfisik, seperti hak atas kekayaan intelektual (HKI), dapat diterima sebagai jaminan tanpa harus diserahkan secara fisik.

Berkaitan dengan hal tersebut, konten YouTube baik dalam bentuk video, musik, maupun gambar merupakan karya yang dilindungi oleh HKI dan memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, konten semacam ini berpotensi dimanfaatkan sebagai jaminan utang, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Penggunaan sertifikat konten sebagai agunan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah selama tidak mengandung unsur riba, maysir (judi), maupun hal-hal yang diharamkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 memperkenalkan kerangka hukum yang baru dalam hal pengaturan jaminan. Aturan ini merinci ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya suatu jaminan dalam transaksi utang, termasuk jenis aset apa saja yang dapat dijadikan jaminan. Di dalamnya dijelaskan bahwa jaminan bisa berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, maupun bentuk kekayaan lain yang memiliki nilai ekonomi. Dengan dasar itu, penting untuk ditinjau apakah sertifikat YouTube, sebagai salah satu bentuk aset digital, dapat memenuhi kriteria tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 2022 yang berkaitan langsung dengan sertifikat YouTube, serta melihat dampaknya terhadap praktik lembaga keuangan dalam menerima aset digital sebagai jaminan hutang.